

EVALUASI KINERJA BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

TAHUN 2024

No	Kodrek	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	1		2		3		4	
						W	T	W	T	W	T	W	T
						Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
<b>Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial</b>													
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>													
A	1.06.02.2.03	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Daerah Kab/kota											
1	1.06.02.2.03.0001	<i>Sub. Kegiatan</i> : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	192	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	192	100,00%
2	1.06.02.2.03.0002	<i>Sub. Kegiatan</i> : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Orang	17	-	0,00%	-	0,00%	15	88,23%	-	0,00%
3	1.06.02.2.03.0003	<i>Sub. Kegiatan</i> : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	30	-	0,00%	-	0,00%	30	100,00%	300	1000,00%
4	1.06.02.2.03.0004	<i>Sub. Kegiatan</i> : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	38	-	0,00%	-	0,00%	38	100,00%	-	0,00%
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>													
		Kegiatan: Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal											
1	1.06.03.2.01.0001	Sub . Kegiatan: Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota										
REFOCUSING													
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>													

B	1.06.04.2.0001	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											
1	1.06.04.2.01.0001	Sub. Kegiatan : Penyediaan Permakanaan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Orang	40	58	145,00%	97	242,50%	80	200,00%	40	100,00%
2	1.06.04.2.01.0003	Sub. Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29	15	51,72%	18	62,07%	29	100,00%	-	0,00%
3	1.06.04.2.01.0006	Sub. Kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	50	-	0,00%	1	2,00%	50	100,00%	-	100,00%
4	1.06.04.2.01.0008	Sub.Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	Orang	30	1	3,33%	3	10,00%	5	16,67%	8	26,67%
5	1.06.04.2.01.0010	Sub. Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	30	8	26,67%	6	20,00%	24	80,00%	14	46,67%
6	1.06.04.2.01.0002	Sub. Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	30	58	193,33%	98	326,67%	30	100,00%	-	0,00%
7	1.06.04.2.01.0011	Sub. Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	ORANG	30	2	6,67%	6	20,00%	2	6,67%	13	43,33%
8	1.06.04.2.01.0004	Sub. Kegiatan: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	30	2	6,67%	5	16,67%	2	6,67%	11	36,67%
9	1.06.04.2.01.0005	Sub. Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	25	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	25	100,00%
10	1.06.04.2.01.0007	Sub. Kegiatan: Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	20	1	5,00%	1	5,00%	6	30,00%	4	20,00%

11	1.06.04.2.01.0009	Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kab/Kota	ORANG	25	78	312,00%	104	416,00%	49	196,00%	49	196,00%
12	1.06.04.2.01.0012	Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	20	2	10,00%	3	15,00%	12	60,00%	9	45,00%
C	1.06.04.2.02	<i>Kegiatan</i> : Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial											
1	1.06.04.2.02.11.	<i>Sub. Kegiatan</i> : Pemberiaan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	REFOCUSING									
2	1.06.04.2.02.0014	<i>Sub. Kegiatan</i> : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Kemitraan yang Bekerjasama dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	50	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Purwakarta, 03 Januari 2025

Mengetahui,

KEPALA BIDANG  
REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL



1. Indikator Jumlah Kesejahteraan sosial yang di bina (d disesuaikan dengan indikator kegiatan masing masing)

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Sasaran		%	Realisasi dan Target Kinerja									Rencana Aksi	Permasalahan	Tindak Lanjut Rencana Aksi dan Upaya Mengatasi Permasalahan	Ket.			
			Satuan	(S)		S	TW1	%	S	TW2	%	S	TW3	%					S	TW4	%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>																					
A	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Daerah Kab/kota																				
1	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	192 Orang	100%	Orang	192	100%									Koordinasi dengan DPRD, Kepala Desa/Kelurahan	Belum adanya data PPKS di setiap desa dan kelurahan, tidak semua PSM memilih SK (dasar pelaksanaan tugas)	PSM melakukan pendataan PPKS di wilayah kerja masing-masing.	192 PSM yang memiliki SK melakukan pendataan PPKS	
2	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	ORANG	17 Orang	100%		Orang	17	100%								Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Kemensos RI	Terjadinya kekosongan TKSK, kurangnya pemahaman TKSK mengenai Topoksinya.	melakukan peningkatan kemampuan TKSK, melakukan rekrutmen TKSK baru	Diberikan sosialisasi tentang peran dan fungsi TKSK dalam Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kecamatan	
3	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	40 Keluarga	100%		Keluarga	15	50%								melakukan koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas dan Komda lansia	Kurangnya perhatian mengenai peringatan hari disabilitas dan Lansia	mengadakan kegiatan peringatan hari lansia serta hari disabilitas	pelaksanaan Peringatan Hari Lansia dan Disabilitas	
4	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	40 Lembaga	100%	Lembaga	10	25,0%	Lembaga	10	25,0%	Lembaga	10	25,0%	Lembaga	10	25,0%	Koordinasi dengan DPRD Kab. Purwakarta, Ketua Forum LKS Kab. Purwakarta, SLRT, Puskesmas, Karang Taruna, Dinsos Prov Jabar	Rendahnya Kapasitas PSKS di Kabupaten Purwakarta	Melakukan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna, SDM SLRT-Puskesmas, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Meningkatnya kapasitas PSKS di Kabupaten Purwakarta
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>																					





1	Sub. Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	30	Orang	100%	orang	10	33,3%	orang	10	33,3%	orang	5	16,7%	orang	5	16,7%	Koordinasi dengan PSM, TSKK dan pihak desa/kelurahan	kesulitan dalam penjangkauan penerima manfaat	Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD, LKSA, Desa/Kelurahan untuk menjangkau penerima manfaat	menyalurkan bantuan pebekalan kesehatan
2	Sub. Kegiatan: Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	30	Dokumen	100%				Dokumen	30	100,0%							Koordinasi antar perangkat daerah	belum optimalnya pelaksanaan SLRT dan Puskesmas	melakukan sosialisas mengenai SLRT dan Puskesmas	terjalintya kerjasama antar lembaga dan kemitraan

Purwakarta, 03 Januari 2025  
 Mengetahui  
 KEPALA BIDANG  
 REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL  
  
**DINDIN IBRAHIM MULYANA, S.Ag**  
 NIP. 19741127 201001 1 001



BIDANG : PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

No	Kodring	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
						Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
A		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Lembaga	30								
1				Tahun	1								
1	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak - anak Terlantar											
	1.06.05.2.01.01	- Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten kota	Orang	20	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	1.06.05.2.01.02	- Rujukan Anak - Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	20	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	1.06.05.2.01.03	- Pemantauan Anak - Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten / kota	Orang	20	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
2	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
	1.06.05.2.02.01	- Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	34.000	10.994	32%	16.455	48%	27.218	80%	44.214	130%
	1.06.05.2.02.02	- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten / kota	Keluarga	103.538	108.811	105%	110.048	106%	88.882	86%	110.354	107%
	1.06.05.2.02.03	- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten / kota	Keluarga	30.701	31.894	104%	31.905	104%	24.138	79%	32.315	105%
	1.06.05.2.02.04	- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatk bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten / kota	Orang	20	-	0%	20	100%	20	100%	20	100%
B		PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial											
	1.06.06.2.01.01	-Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	802	802%	848	848%	882	882%	1088	1088%
	1.06.06.2.01.02	-Penyediaan Sandang	dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia	Orang	70	802	1146%	848	1211%	882	1260%	1088	1554%
	1.06.06.2.01.03	- Penyediaan Tempat Penampungan	Jumlah Tempat Pengungsian	Unit	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	1.06.06.2.01.04	- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Orang	30	18	60%	31	103%	45	150%	109	363%
	1.06.06.2.01.04	- Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang	Orang	30	0	0%	6	20%	12	40%	56	187%
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											
	1.06.06.2.02.01	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

1.06.06.2.02.02	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%
-----------------	--	---	-------	----	----	------	----	------	----	------	----	------

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Dra. Yuyun Hasanah  
NIP. 19670615 199303 2 004



1. Indikator Jumlah Kesejahteraan sosial yang di bina (d disesuaikan dengan indikator kegiatan masing masing)

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Sasaran			%	Realisasi dan Target Kinerja												Rencana Aksi	Permasalahan	Tindak Lanjut Rencana Aksi dan Upaya Mengatasi Permasalahan	Ket.
			Satuan	(S)			S	TW1	%	S	TW2	%	S	TW3	%	S	TW4	%				
1	- Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten kota	ORANG	20	Orang	100%	ORANG	0,0%	orang	0,0%	orang	0%	orang	0,0%				Koordinasi dengan Lintas Sektor,PSKS lainnya		Refokusing		
2	- Rujukan Anak - Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan Kabupaten / Kota	ORANG	20	Orang	100%	ORANG	0,0%	orang	0,0%	orang	0%	orang	0,0%				Koordinasi dengan Lintas Sektor,PSKS lainnya		Refokusing		
3	- Pemantauan Anak - Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten / kota	ORANG	20	Orang	100%	ORANG	0,0%	orang	0,0%	orang	0%	orang	0,0%				Koordinasi dengan Lintas Sektor,PSKS lainnya		Refokusing		
4	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (KPM PKH)	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten / kota	KK	30.701	KK	100%	KK	31.894	103,9%	KK	31.905	103,9%	KK	24.138	79%	KK	32.315	105,3%	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan SDM Fasilitator Bansos, Pihak Bank Himbara dan agen penyalur	Kurang berjalannya pemutakhiran data KPM	Berkoordinasi dengan lintas sektor seperti pendamping dengan operator SIKS-NG di Desa / Kelurahan agar data dapat termutakhirkan	Realisasi Bantuan Sosial PKH yang difasilitasi / dibantu oleh SDM Pendamping PKH TW 3 realisasi bansos PKH Periode Juli-Agustus melalui HIMBARA (Penyaluran melalui Pos Belum Realisasi karena sedang proses burekol pengalihan ke HIMBARA)
	SDM PPKH		ORANG	81	Orang	100%	Orang	81	100,0%	Orang	78	96,3%	Orang	70	86%	Orang	70	86,4%	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan SDM Fasilitator Bansos			Honor SDM Fasilitator Bansos (PPKH) bulan Jan s/d Sept Bersumber dari RKA / DPA 2024 Jumlah SDM PPKH s/d Sept 2024 Koorkab = 2 Orang Pendamping = 68 Mengundurkan Diri : 11 Orang
5	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	ORANG	34.000	Jiwa	100%	Orang/Jiwa	10.994	32,3%	Orang/Jiwa	16.455	48,4%	Orang/Jiwa	27.218	80%	Orang	44.214	130,0%	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Koordinasi dengan operator desa / kelurahan agar memadankan data dan memverifikasi data meninggal serta non aktif	Pendataan, verifikasi dan validasi data fakir miskin yang diusulkan ke DTKS dan Penerima Bansos (PKH, BPNT, PBI APBN)
	PBI APBN		ORANG	349.033	Jiwa	100%	Orang/Jiwa	356.306	102,1%	Orang/Jiwa	356.172	102,0%	Orang/Jiwa	359.614	103%	Orang	354.906	101,7%	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Koordinasi dengan operator desa / kelurahan agar memadankan data dan memverifikasi data meninggal serta non aktif	Pendataan dan pengolahan data penerima PBI APBN yang didata dan dikelola oleh SDM Operator Data Fakir Miskin
	PBI APBD		ORANG	95.579	Jiwa	100%	Orang/Jiwa	93.882	98,2%	Orang/Jiwa	90.522	94,7%	Orang/Jiwa	92.036	96%	Orang	93.253	97,6%	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Koordinasi dengan operator desa / kelurahan agar memadankan data dan memverifikasi data meninggal serta non aktif	Pendataan dan pengolahan data penerima PBI APBD yang didata dan dikelola oleh SDM Operator Data Fakir Miskin

	SDM Operator Data Fakir Miskin (17 Kecamatan x 12 Bulan)		ORANG	17	Orang	100%	Orang	17	100,0%	Orang	17	100,0%	Orang	17	100%	Orang	17	100,0%	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan PSKS lainnya			Honor SDM Operator Data Fakir Miskin Jan s/d Agust Bersumber dari RKA / DPA 2024 (Koorcam)  SDM Koordinator Operator Kecamatan = 17 Orang
	SDM Operator Data Fakir Miskin (175 Kecamatan x 4 Bulan)		ORANG	175	Orang	100%	Orang	175	100,0%	Orang	175	100,0%	Orang	175	100%	Orang	175	100,0%	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan PSKS lainnya			Honor SDM Operator Desa/Kelurahan Pendata Fakir Miskin TW1 dan TW2 Bersumber dari RKA / DPA 2024 (SDM Operator Pendata = 175 Orang)
6	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (PKH + BPNT)	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten / kota	KK (Keluarga)	103.538	KK (Keluarga)	100%	KK (Keluarga)	108.811	105,1%	KK (Keluarga)	110.048	106,3%	KK (Keluarga)	88.882	86%	KK (Keluarga)	110.354	106,6%	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan, Pendamping PKH	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, data non aktif, juga verifikasi ketidaklayakan yang masih kurang update	Koordinasi dengan operator desa / kelurahan agar memadankan data dan memverifikasi data meninggal serta non aktif	Pengolahan data KPM penerima PKH dan BPNT yang dikelola diantaranya oleh SDM Pengelola Data Fakir Miskin  <b>TW 3 realisasi bansos PKH dan BPNT Periode Juli-Agustus melalui HIMBARA (Penyaluran melalui Pos Belum Realisasi karena sedang proses burekol pengalihan ke HIMBARA)</b>
	SDM Pengelola Data Fakir Miskin (2 orang x 12 Bulan)		ORANG	2	Orang	100%	Orang	2	100,0%	Orang	2	100,0%	Orang	2	100%	Orang	2	100,0%	Koordinasi dengan Lintas Sektor, PSKS lainnya			Honor SDM Tenaga Teknis Pengelola Data Fakir Miskin Jan - Agustus Bersumber dari RKA / DPA 2024  SDM Pengelola Data Kabupaten = 2 Orang
7	Fasilitasi/Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten / kota	ORANG	20	Orang	100%	Orang		0,0%	Orang	20	100,0%	Orang	20	100%	Orang	20	100,0%	Koordinasi dengan lintas sektor, Perangkat Desa / Kelurahan maupun Kecamatan yang terdapat PPKS (WRSE) yang memiliki potensi usaha			Kegiatan diikuti oleh 20 KPM PKH yang memiliki usaha di Kec. Darangdan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan pemberian alat usaha (pembuatan Kue) di Triwulan 2 dan Monev di Triwulan 4
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana																				
	Layanan (bencana)																					
8	- Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	Orang	100%	Orang	802	802,0%	Orang	848	848,0%	Orang	882	882%	Orang	1088	1088,0%	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	Gudang logistik yang kurang memadai, Logistik terbatas, lumbung sosial hanya ada di 4 Kecamatan	Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan PSKBA Kemensos RI untuk minta buffer stock tambahan serta lumbung sosial tambahan	Pemberian bantuan permakanaan bersumber anggaran dari DPA APBD Purwakarta, APBD Provinsi, PSKBA Kemensos RI, serta lumbung sosial  Rincian: a. APBD Purwakarta = 100 b. Non APBD Purwakarta (APBD Provinsi, APBN, Lumbung Sosial) = 1088

9	- Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	Orang	100%	Orang	802	1145,7%	Orang	848	1211,4%	Orang	882	1260%	Orang	1088	1554,3%	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	Gudang logistik yang kurang memadai, Logistik terbatas, lumbung sosial hanya ada di 4 Kecamatan	Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan PSKBA Kemensos RI untuk minta buffer stock tambahan serta lumbung sosial tambahan	Pemberian bantuan sandang bersumber anggaran dari DPA APBD Purwakarta, APBD Provinsi, PSKBA Kemensos RI, serta lumbung sosial  Rincian: a. APBD Purwakarta = 70 b. Non APBD Purwakarta (APBD Provinsi, APBN, Lumbung Sosial) = 1088
10	- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi	1	Lokasi	100%	Lokasi	1	100,0%	Lokasi	1	100,0%	Lokasi	1	100%	Lokasi	1	100,0%	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	Terjadinya bencana bersifat aksidental (tidak dapat di prediksi) + Terdampak refocusing (pemotongan anggaran 10 jt)	Koordinasi dengan BPBD, TAGANA, dan pengelola lumbung sosial untuk siaga bencana	Bencana Pergeseran Tanah (Status Tanggap Darurat) Di Kecamatan Tegalarwu Total Pengungsi 744 Orang
11	- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Orang	100%	Orang	18	60,0%	orang	31	103,3%	orang	45	150%	orang	109	363,3%	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	KK yang tidak dilampirkan di surat permohonan	Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk melampirkan KK	Lansia: 20 Orang Balita: 13 Orang Anak-Anak: 76 orang  Sumber anggaran APBD Purwakarta, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN (PSKBA Kemensos RI)  Rincian: a. APBD Purwakarta = 30 orang b. Non APBD Purwakarta (APBD Provinsi, APBN) = 45 orang
12	- Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Orang	100%	Orang	5	16,7%	orang	6	20,0%	orang	12	40%	orang	56	186,7%	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	KK yang tidak dilampirkan di surat permohonan	Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk melampirkan KK	Layanan Dukungan Psikososial dilakukan pada pengungsi Kec. Tegalarwu kolaborasi antara TAGANA dengan bidang PPA sebanyak 5 anak dan pemberian bantuan sosial pendukung psikososial (radio Portable utk Lansia dan Mainan Anak untuk Anak-Anak) = 51 Orang
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																					
13	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung / Kecamatan	1	Kampung/ Kecamatan	100%	Kampung/ Kecamatan	1	100,0%	Kampung/ Kecamatan	1	100,0%	Kampung/ Kecamatan	1	100%	Kampung/ Kecamatan	1	100,0%	Koordinasi dengan Lintas Sektor, stakeholder bencana dan TAGANA	Untuk membangun KSB diperlukannya SK Bupati dan kesiapan dari masyarakat / kampung / kecamatan untuk mengajukan KSB	Koordinasi dengan Kecamatan Rentan Bencana terkait Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Rapat Koordinasi pelaksanaan lumbung sosial sebagai bentuk pelaksanaan kampung siaga bencana
	SDM Pengelola Lumbung Sosial 3 Orang x 4 Lumbung		Orang	12	Orang	100%	Orang	12	100,0%	Orang	12	100,0%	Orang	12	100%	Orang	12	100%				Honor Pengelola Lumbung Sosial TW 1 - TW 4

14	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	orang	100%	Orang	18	100,0%	orang	18	100,0%	orang	18	100%	orang	18	100,0%	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	Kurangnya anggota TAGANA di Kabupaten Purwakarta (belum mewakili Kecamatan) minimal 2 personil per kecamatan.	Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kemensos direktorat PSKBA untuk pra syarat pengajuan personil TAGANA baru	Honor Tagana, Rapat koordinasi SDM TAGANA SDM TAGANA 18 Orang
----	--	---	-------	----	-------	------	-------	----	--------	-------	----	--------	-------	----	------	-------	----	--------	--	---	---	--

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**Dra. Yuyun Hasanah**  
NIP. 19670615 199303 2 004



Purwakarta, 08 Januari 2024  
Menegeti,  
Kepala Bidang Inklusos PRM  
**EKA PRINAWININGSIH, S.ST, M.KES.**  
NIP. 19850717 200604 2 005

## Evaluasi Kinerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024

No	Kodring	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
						Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
<b>Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak</b>													
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>											
I	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1								
1.	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan	100



2.	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	2	Pembayaran Honorarium bulan Desember Tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :  1. Honorarium Penyuluh dan Pendampingan (4 Orang)  2. Honorarium Pegawai Bale Titirah/P2TP2A (5 Orang)	25	<b>A.</b> Pembayaran Honorarium bulan Januari s.d. April Tahun 2024 yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :  1. Honorarium Penyuluh dan Pendampingan (4 Orang)  2. Honorarium Pegawai Bale Titirah/P2TP 2A (5 Orang)  <b>B.</b> Pembayaran Honorarium bulan Mei Tahun 2024 yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2024, dengan rincian	25	<b>A.</b> Pembayaran Honorarium bulan Juni s.d. Agustus Tahun 2024, yang dibayarkan pada bulan September dengan rincian sebagai berikut :  1. Honorarium Penyuluh dan Pendampingan (3 Orang)  2. Honorarium Pegawai Bale Titirah/P2TP 2A (5 Orang)	25	-	-
----	-----------------	--	--	------------------	---	---	----	---	----	--	----	---	---

								sebagai berikut :					
								1. Honorarium Penyuluh dan Pendampingan (4 Orang)					
								2. Honorarium Pegawai Bale Titirah/P2TP 2A (5 Orang)					
II	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	50								
1.	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	30	Pembayaran Honorarium bulan Desember Tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :	25	<b>A.</b> Pembayaran Honorarium Unit PPA Polres Purwakarta bulan Januari s.d. April Tahun 2024 yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024  <b>B.</b> Pembayaran Honorarium Unit PPA Polres Purwakarta	25	<b>B.</b> Pembayaran Honorarium Unit PPA Polres Purwakarta bulan Tahun 2024 yang dibayarkan pada bulan Juni s.d. Agustus Tahun 2024, yang dibayarkan pada bulan September	25	Rapat Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan dengan tema "Meningkatkan Kepedulian dan Peran Aktif Masyarakat dalam	25

					Purwakarta (4 Orang)  2. Honorarium Advokat (1 Orang)		bulan Mei Tahun 2024 yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2024.			Pencegah an dan Penanga nan Kasus Kekerasa n Terhadap Perempu an dan Anak, peserta 30 Orang, dihadiri oleh Perangka t Kecamat an Cibatu, Perangka t Desa dan Ketua PAAREDI CEKAS Tk. Desa, dinarasu mberi oleh Plt. Kepala Kesbangp ol Kabupate n Purwakar ta	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2.	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>											
III	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	50								
1.	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha	Jumlah organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	50	-	-	1. Kegiatan Rakor Gugus Tugas KLA ke 1, peserta 35 Orang dari OPD Kabupaten Purwakarta. 2. Kegiatan Rakor APSAI, peserta 35 Orang dari Perusahaan Kabupaten Purwakarta. 3. Kegiatan Bimtek KHA Gugus Tugas KLA, peserta 35 Orang dari OPD Kabupaten Purwakarta.	68%	1. Kegiatan Rakor PUSPAGA untuk menunjang KLA, peserta 35 Orang dihadiri TP. PKK Kecamatan, Ketua PUSPAGA Kecamatan dan PUSPAGA Kabupate.	17%	1. Kegiatan Rakor KLA ke 3, peserta 35 Orang peserta 35 Orang dari OPD Kabupate n Purwakarta.	16%

IV	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Persen	98								
1.	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	-	-			Kegiatan Kapsitas Building Cegah Dampak Digitalisasi, peserta 30 Orang, diikuti oleh Forum Anak Purwakarta	94%	-	-

Purwakarta, 07 Januari 2025  
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,



Hj. Rd. HENI HENDRAYANI, S.H., MM.  
Pembina IV/a  
Nip. 19671108 199302 2 001

**1. Indikator Jumlah Pengaduan Kasus yang Terlayani (d disesuaikan dengan indikator kegiatan masing masing)**

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran (S)	%	Realisasi dan Target Kinerja												Rencana Aksi	Permasalahan	Tindak Lanjut Rencana Aksi dan Upaya Mengatasi Permasalahan	Ket
						S	TW1	%	S	TW2	%	S	TW3	%	S	TW4	%				
1.	Pengaduan Kasus Kekerasan	Jumlah pengaduan kasus kekerasan yang terlayani	Lembaga	Perempuan dan anak korban kekerasan	100	P2T P2 A	38	38	P2T P2 A	29	29	P2T P2 A	22	22	P2T P2 A	55	55	Melakukan konseling pada korban kekerasan dan home visit bila diperlukan	1. Pelaku yang tidak kooperatif saat pemanggilan  2. Tidak ada rumah aman bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak, karena berdampak ancaman dari terlapor/pelaku	Tim P2TP2A, Tim Psikolog dan Pemerhati Anak melakukan home visit dan Pemerintah mendirikan Rumah Aman bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak.	

Purwakarta, 07 Januari 2025

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,



Hj. Rd. HENI HENDRAYANI, S.H., MM.  
Pembina IV/a  
Nip. 19671108 199302 2 001